

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang berkelanjutan adalah syarat penting dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu negara. Pembangunan yang berkelanjutan dinilai mampu mempertahankan kualitas hidup manusia di masa sekarang dan juga di masa depan. Namun, pembangunan yang berkelanjutan ini belum cukup dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu negara tanpa dibarengi dengan pembangunan yang inklusif.

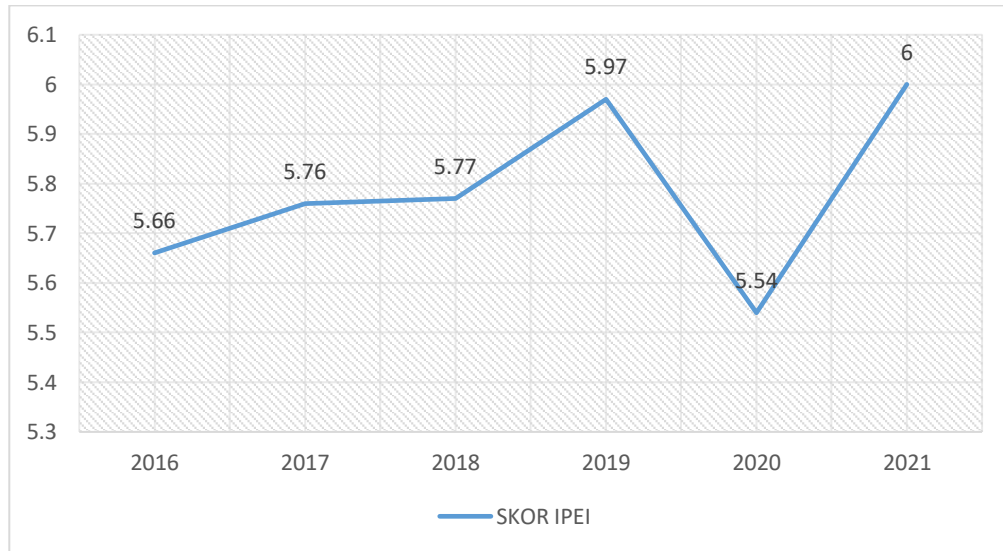
Sejarah pembangunan ekonomi inklusif dimulai pada tahun 1990-an, ketika para pembuat kebijakan mulai menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa memastikan bahwa semua orang dapat mengambil bagian. Pada tahun 1995, Bank Dunia mengeluarkan laporannya yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Strategi untuk Meningkatkan Kesejahteraan”. Laporan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua orang dapat mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi dan memperoleh manfaatnya (Vetterlein, 2007). Pemikiran tentang pembangunan ekonomi inklusif berkembang dari konsep pembangunan ekonomi yang lebih luas dan berkembang pada akhir abad ke-20. Pada tahun 2011, Bank Dunia mengembangkan program baru yang disebut “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” untuk meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat yang kurang berkepentingan dalam ekonomi (Germana & Luisa, 2017).

Sedangkan di Indonesia, pemikiran tentang pembangunan ekonomi inklusif berkembang mulai awal 2000-an, ketika pemerintah Indonesia menetapkan tujuan pembangunan nasional yang mengutamakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada saat itu, ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor ekspor komoditas dan investasi asing yang menyebabkan ketimpangan ekonomi yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan inklusif seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu keluarga miskin (Akhmadi, 2017).

Pembangunan Ekonomi Inklusif telah menjadi inti dari pandangan perencanaan ekonomi di Indonesia. Pemerintah telah mengembangkan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2015, Indonesia mengadopsi konsep pembangunan ekonomi inklusif sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Konsep ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi.

Dalam era globalisasi dengan persaingan ekonomi yang semakin ketat, pembangunan ekonomi inklusif menjadi salah satu fokus utama bagi setiap negara, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Menurut Bappenas (2021), Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) adalah indeks yang mengukur berdasarkan tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan (Gultom et al., 2023). Selama satu dekade terakhir, pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia mencapai pertumbuhan yang positif, menunjukkan kemajuan dalam upaya pemerataan dan mengurangi ketimpangan, baik dalam skala wilayah maupun antar golongan masyarakat..

Gambar 1. 1 Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia



Sumber : Bappenas, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa secara nasional indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) meningkat dari tahun 2016 sampai 2019, tetapi menurun di tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi covid 19. Tetapi setelah pemberlakuan new normal, nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif masih terus berjalan walaupun ada hambatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menangani dampak dari pandemi covid 19 dengan baik, sehingga dapat memulihkan pembangunan ekonomi inklusif. Data grafik diatas juga menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif berada di angka 5,76 dari tren tersebut bisa dikatakan Indonesia berada dikategori memuaskan.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan inklusif ada beberapa indikator penunjang penghitungannya, atau bisa disebut alat ukur perhitungannya. Salah satu input perhitungannya adalah PDRB Perkapita. PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi PDRB Perkapita, maka dapat dianggap bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat (Hapsari, 2019). Dalam kaitannya dengan pembangunan inklusif, menurut (Safitri, 2021), pertumbuhan

ekonomi yang ada di Indonesia saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada, seperti misalnya masalah ketimpangan, kemiskinan, serta kurangnya akses dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena sesungguhnya pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonominya saja, namun juga memperhatikan faktor kesejahteraan masyarakat dari spektrum yang lebih luas.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu negara, harus menyeimbangkan semua aspek ekonomi, sosial dan budaya. Dilihat dari pemerataan perolehan akses dan kesempatan, Indonesia menjadi negara yang dibenahi lagi dari segi ini. Ketimpangan yang cukup tinggi menjadi tugas dan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Perhitungan ketimpangan diukur dengan koefisien gini atau gini ratio menurut BPS dan Bappenas (2020). Secara umum gini ratio adalah ketidak setaraan pendapatan, semakin tinggi gini ratio maka akan memperbesar ketidaksetaraan. Oleh karena itu, gini ratio yang rendah dapat mendukung pembangunan ekonomi inklusif dengan menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih adil (Todaro, 2003). Gini ratio dapat memberikan indikasi sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi didistribusikan di masyarakat. Jika gini ratio rendah, itu dapat menunjukkan adanya distribusi pendapatan yang lebih merata, mendukung pembangunan inklusif. Sebaliknya, gini ratio yang tinggi mungkin menandakan ketidak setaraan yang dapat menjadi hambatan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif. Gini ratio yang rendah mencerminkan tingkat ketidak kesetaraan setiap lapisan masyarakat atau tiap individu tidak mendapat manfaat yang sama.

Salah satu input dalam pembangunan ekonomi inklusif adalah ketenagakerjaan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat jika suatu daerah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang yang menganggur (pencari kerja), angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, dan juga mereka yang sudah bekerja akan tetapi dalam proses masih mencari pekerjaan. Ketimpangan dalam mendapatkan akses kesempatan dibidang pekerjaan menjadi masalah yang harus dicari oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat et al., 2020) yang berjudul yang

berjudul “The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta”, menyebutkan bahwa dari segi tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang bersifat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini berarti diduga bahwa penyerapan tenaga kerja serta peningkatan akses dan kesempatan yang terjadi di Indonesia selama ini belum optimal, sehingga diperlukan pembenahan kebijakan yang lebih tepat oleh pemerintah Indonesia saat ini.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang harus diatasi dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif (Damayanti et al., 2021). Tingginya angka kemiskinan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak dapat menurunkan kemiskinan menandakan bahwa pertumbuhan yang tidak berkelanjutan. Secara eksplisit pada Sustainable Development Goals (SDGs), memberikan perhatian utama mengenai kemiskinan, dimana tujuan utama adalah menuntaskan kemiskinan dalam bentuk apapun serta mendorong pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Dalam rangka membangun perekonomian yang kuat, terdapat berapa perihal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah yaitu pembangunan modal sumber daya manusia, yang tergambar melalui nilai modal manusia itu sendiri. Nilai modal manusia dapat diperoleh dari pendidikan salah satunya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Hidayat et al., 2020). Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa indikator pendidikan yang berupa variabel rata-rata lama sekolah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi DIY selama periode 2011-2017. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi inklusif.

Pembangunan suatu negara dikatakan baik atau tidaknya dapat dilihat dari dinamika penanaman modal atau investasi. Dengan adanya investasi, maka negara dapat mendorong akses peluang melalui penciptaan lapangan kerja dan pekerjaan produktif. Hal ini terbukti ketika terjadi penurunan investasi

dikarakan persediaan modal tidak cukup. Dengan terbatasnya persediaan modal, maka peluang investasi menjadi terbatas. Dengan demikian, mengakibatkan terhambatnya akses oleh penduduk yang dapat menghambat pula kemampuan kerja oleh tenaga kerja (Klasen, 2010). Investasi yang dilakukan dengan tepat dan efisien dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Agar menghasilkan investasi yang cukup guna mendorong pertumbuhan ekonomi, Rostow berpendapat bahwa setiap upaya harus mampu menggerakkan penanaman modal baik di dalam negeri maupun internasional (Wahyuni et al., 2014).

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia*. Faktor-faktor yang dibawa di penelitian ini berupa PDRB perkapita, Pengangguran, Kemiskinan, Gini Ratio, Pendidikan dan Investasi. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan variable PDRB Perkapita, Pengangguran, Kemiskinan, Gini Ratio, Pendidikan dan investasi terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif?
2. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita, Pengangguran, Kemiskinan, Gini Ratio, Pendidikan dan Investasi di Indonesia secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif?
3. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita, Pengangguran, Kemiskinan, Gini Ratio, Pendidikan dan Investasi di Indonesia secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perkembangan variable PDRB perkapita, pengangguran, kemiskinan, gini ratio, pendidikan dan investasi terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh PDRB perkapita, pengangguran, kemiskinan, gini ratio, pendidikan dan investasi di Indonesia secara parsial terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif.
3. Menganalisis pengaruh PDRB perkapita, pengangguran, kemiskinan, gini ratio, pendidikan dan investasi di Indonesia secara simultan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Untuk Peneliti Lain

Peneliti berharap masyarakat Indonesia dapat mengambil manfaat dari ilmu yang diperoleh dari studi ini. Selain itu, akan sangat bagus jika masyarakat dapat memahami apa yang mendorong pembangunan ekonomi. Para peneliti di masa depan yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa namun lebih mendalam dapat menggunakan karya ini sebagai referensi.

2. Manfaat Untuk Pemerintah Indonesia

Peneliti mengantisipasi bahwa pemerintah akan dapat menggunakan temuan studi ini untuk merancang kebijakan yang memfasilitasi optimalisasi kegiatan ekonomi dan produktivitas, sehingga menghasilkan distribusi output yang lebih adil di pasar domestik dan internasional dan pada akhirnya, pertumbuhan PDB yang lebih tinggi.